

**Aplikasi APPA Dinas PRKP Cipta Karya Jember
Dapat Membantu Disiplin Penyerapan Anggaran Daerah**

**The APPA application for the PRKP Cipta Karya Jember Office
Can Help Discipline Absorption of Regional Budgets**

Antonius Bun Wijaya¹, Anisha Dwi Nur Fadlilah², Hanna Pratiwi³,
Yehezkiel Victorious Ermanto⁴, Yulia Wahyuningsih^{5*}

^{1 2 3 4 5} Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya

¹antonius.wijaya@student.ukdc.ac.id, ²anisha.fadlilah@student.ukdc.ac.id,

³hanna.pratiwi@student.ukdc.ac.id, ⁴yehezkiel.ermanto@student.ukdc.ac.id, ⁵yulia@ukdc.ac.id

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

Jember is a district in the province of East Java, Indonesia. Administratively, Jember Regency is divided into 28 sub-districts with 226 villages and three sub-districts with 22 sub-districts. Of course, with a large number of sub-districts and regencies in terms of absorption of the regional budget, special attention is required so that all regional budgets can be appropriately absorbed. Budget absorption is a measure of the success of the local government. To realize optimal budget absorption in a region requires a solution so that regional budget absorption runs smoothly; one solution is by extracting the need for ease of a technology-based budget submission process so that it is possible to provide solutions to several obstacles. Responding to various complex problems experienced by partners, the community service proposal team formulates a solution by extracting the need for an easy technology-based budget submission process called "APPA (Budget Absorption Notification Application)". This application will be continuously evaluated and developed according to the needs of the relevant offices. This service aims to help make applications to the Public Housing, Settlement Areas and Human Settlement Services (DPRKPCP), which need tools for the budget submission process. The results of this study can become the basis for improvement and development in the use of information technology in the budget absorption process, which impacts improving SKPD performance.

Keywords: Public Housing Service, eGovernment; Budget Absorption.

Abstrak

Jember merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Tentunya dengan banyaknya jumlah kecamatan dan kabupaten dalam hal penyerapan anggaran daerah memerlukan perhatian khusus agar semua anggaran daerah bisa terserap dengan baik. Serapan anggaran merupakan ukuran dari keberhasilan dari pemerintah daerah. Untuk mewujudkan serapan anggaran yang optimal dalam suatu daerah memerlukan

sebuah solusi agar serapan anggaran daerah berjalan lancar, salah satu solusi yaitu dengan cara mengekstraksi kebutuhan akan kemudahan proses pengajuan anggaran berbasis teknologi sehingga memungkinkan memberi solusi terhadap beberapa kendala. Menanggapi berbagai permasalahan kompleks yang dialami oleh mitra, maka tim pengusul pengabdian merumuskan solusi yaitu dengan cara mengekstraksi kebutuhan akan kemudahan proses pengajuan anggaran yang berbasis teknologi yang disebut “APPA (Aplikasi Pemberitahuan Penyerapan Anggaran)”. Aplikasi yang dibuat ini nantinya akan terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dinas terkait. Tujuan pengabdian ini adalah membantu membuat aplikasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya (DPRKPCP) yang membutuhkan alat bantu untuk proses pengajuan anggaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan dan pengembangan pada penggunaan teknologi informasi pada proses penyerapan anggaran yang berimbas pada meningkatnya kinerja SKPD.

Kata Kunci: Dinas Perumahan Rakyat, Praktek Baik Pemerintahan; Serapan Anggaran Daerah.

PENDAHULUAN

Jember merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Tentunya dengan banyaknya jumlah kecamatan dan kabupaten dalam beberapa hal mengenai kepentingan pemerintahan masih cukup kurang dalam penanganannya, khususnya yang dikeluhkan oleh salah satu dinas pemerintahan di Kabupaten Jember yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya mengenai penyerapan anggaran daerah yang masih memerlukan perhatian khusus agar semua anggaran daerah bisa terserap dengan baik khususnya di Dinas – Dinas terkait di kabupaten jember yang serapan anggrannya kurang baik dan optimal selain daripada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya¹.

Serapan anggaran adalah persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah/SKPD berupa laporan keuangan yang disebut realisasi anggaran. Serapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola target-target pembangunan yang dalam angka-angka keuangan dalam laporan keuangan, yang merupakan akuntabilitas media. Keuangan publik harus dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan publik, merencanakan dengan baik rencana pembayaran selama satu bulan tahun anggaran. Perbedaan antara anggaran dan realisasinya menggambarkan varian anggaran, yang secara pertunjukan menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi secara implisit menunjukkan bahwa sisa anggaran (varian anggaran) yang rendah pada akhir tahun, yang memiliki kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran. Terdapat 73,50% serapan anggaran yang dibutuhkan oleh empat faktor, yakni perencanaan anggaran, pelaksanaan

¹ “Parasetamol - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Parasetamol>.

anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan satuan kerja internal, yang didukung hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh serta mencerminkan beban kerja SKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait².

Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp134,26 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan I 2022 hanya sebesar 9,28% terhadap pagu anggaran. Wakil Gubernur Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jawa Timur, untuk mempercepat realisasi APBD 2022. Untuk target penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada triwulan (TW) I ialah sebesar 23,58%, TW II sebesar 57,34%, TW III sebesar 84,12% sehingga pada TW IV mencapai 100%³. Selain itu di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur khususnya di kabupaten Jember, menurut Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni usai rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DPRD Jember, Jawa Timur, hampir semua OPD mitra kerja Komisi A serapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Rendahnya serapan APBD di beberapa OPD juga diakui oleh Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono yang menyampaikan mitra kerja OPD di komisinya juga masih berjalan stagnan. "Serapan anggaran beberapa OPD masih berkisar 38 hingga 40 persen karena alasan sistem dan mutasi, sehingga pejabat atau pegawai yang dipindah harus menyesuaikan lagi". Berdasarkan hal ini beliau berharap masing-masing OPD bekerja dalam menyerap anggaran terutama untuk kegiatan yang langsung dengan masyarakat. Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto optimistis serapan APBD bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun 2021, sehingga semua program OPD bekerja. "Semua OPD sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di atas 90 persen"⁴.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Jember, maka ditemukan permasalahan umum yang terjadi pada Dinas terkait sebagai berikut: (1) Berjalanya penyerapan anggaran Tidak optimal karena tidak adanya notifikasi pengingat tugas dari beberapa divisi yang ini menyebabkan jadwal yang sudah ditentukan menjadi mundur dan tidak sesuai sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak terserap dengan baik; (2) Kurang efektifnya dalam hal surat menyurat dimana segala surat yang masuk harus di cek oleh pimpinan secara manual, sedangkan pimpinan tidak selalu berada di kantor, hal ini menyebabkan terjadinya double pembuatan surat tugas dari pimpinan ke anggota dikarenakan prnumpukan surat yang masuk dan masih harus di cek secara manual.

Perancangan desain antarmuka (User Interface/UI) dan desain pengalaman pengguna (User Experience/UX) merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Pembuatan desain ini melibatkan tahapan-tahapan seperti melakukan kegiatan untuk mengetahui kebutuhan pengguna dengan melakukan wawancara dan observasi kebutuhan pengguna, menggambarkan ide atau pandangan user menjadi dasar produk aplikasi yang akan dibuat. Membuat daftar kebutuhan pengguna. Selanjutnya menggambarkan solusi yang dibutuhkan dengan melakukan evaluasi bersama tim desain dan menggabungkan kreativitas dari masing-masing desainer aplikasi. Kemudian dilakukan pengembangan prototipe untuk

² Ruhmaini Ruhmaini, Syukriy Abdullah, and Darwanis Darwanis, "Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2019): 31–43.

³ Dinas Kominfo, "Wagub Emil Instruksikan TW II 2022 APBD Jatim Terserap 50%," *Jatim Newsroom*, 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/wagub-emil-instruksikan-tw-ii-2022-apbd-jatim-terserap-50->

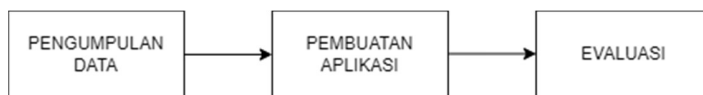
⁴ "Serapan APBD Jember Tahun Anggaran 2021 Masih Rendah - ANTARA News Jawa Timur," n.d.

mengimplementasikan ide yang sudah didapatkan dari tahapan sebelumnya menjadi sebuah aplikasi dan produk yang dapat diuji coba. Tahapan ini menghasilkan produk jadi dan skenario penggunaan aplikasi. Hasil produk jadi selanjutnya diuji coba sehingga berdasarkan pengalaman dari pengguna akan didapatkan masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan pada produk yang ada.

Dari penelitian terdahulu belum pernah dilakukan solusi holistik yang berangkat dari temuan-temuan terkait faktor penghambatan yang telah dilakukan, melainkan merupakan penelitian terpisah terkait penggunaan aplikasi secara umum. Untuk menanggapi hal tersebut maka sebagai langkah awal, pengabdian masyarakat ini menerapkan metode SDLC yang diaplikasikan untuk membuat desain UI/UX aplikasi serapan anggaran berbasis website untuk menganalisis atribut kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Jember terkait permasalahan serapan anggaran dan merancang suatu aplikasi yang secara spesifik digunakan untuk membantu proses penyerapan anggaran pada lingkungan SKPD terkait⁵.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dimulai sejak September 2022 yang diawali dengan melakukan pertemuan secara online dengan mitra melalui google meet dan untuk kegiatan selanjutnya dilakukan secara daring dan luring untuk penentuan tahapan awal, tahapan proses dan juga tahapan penutupan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui ketika melakukan pengabdian masyarakat ini, yaitu (a) Pengumpulan Data, (b) Pembuatan Aplikasi, (c) dan Evaluasi.

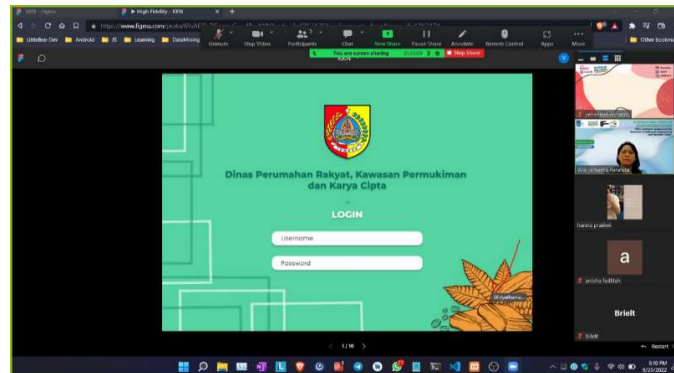


Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari diskusi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Jember. Menggunakan metode wawancara untuk user requirement Data sekunder yang dikumpulkan adalah studi literatur terkait peraturan daerah tentang serapan anggaran, teori SDLC, desain UI/UX data pendukung penelitian lainnya.

⁵ Erma Susanti, Erfanti Fatkhiyah, and Endang Efendi, "Pengembangan Ui/Ux Pada Aplikasi M-Voting Menggunakan Metode Design Thinking," *Simposium Nasional RAPI XVIII* (2019): 364–370.



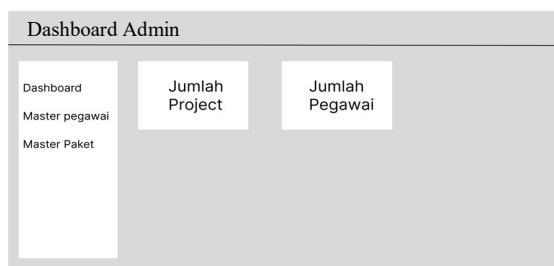
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Secara Online

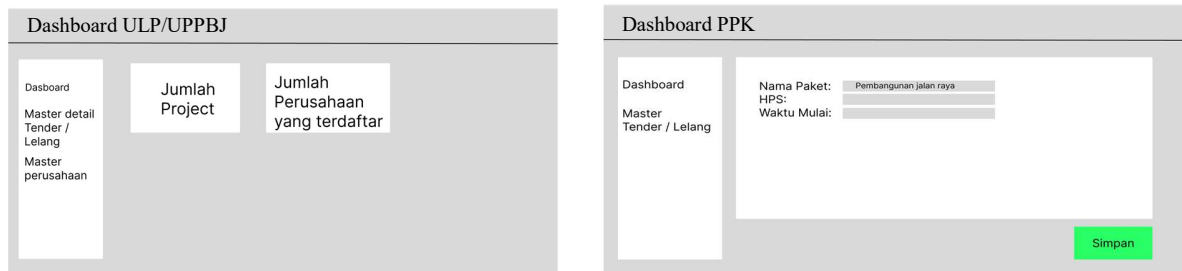


Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Secara Tatap Muka

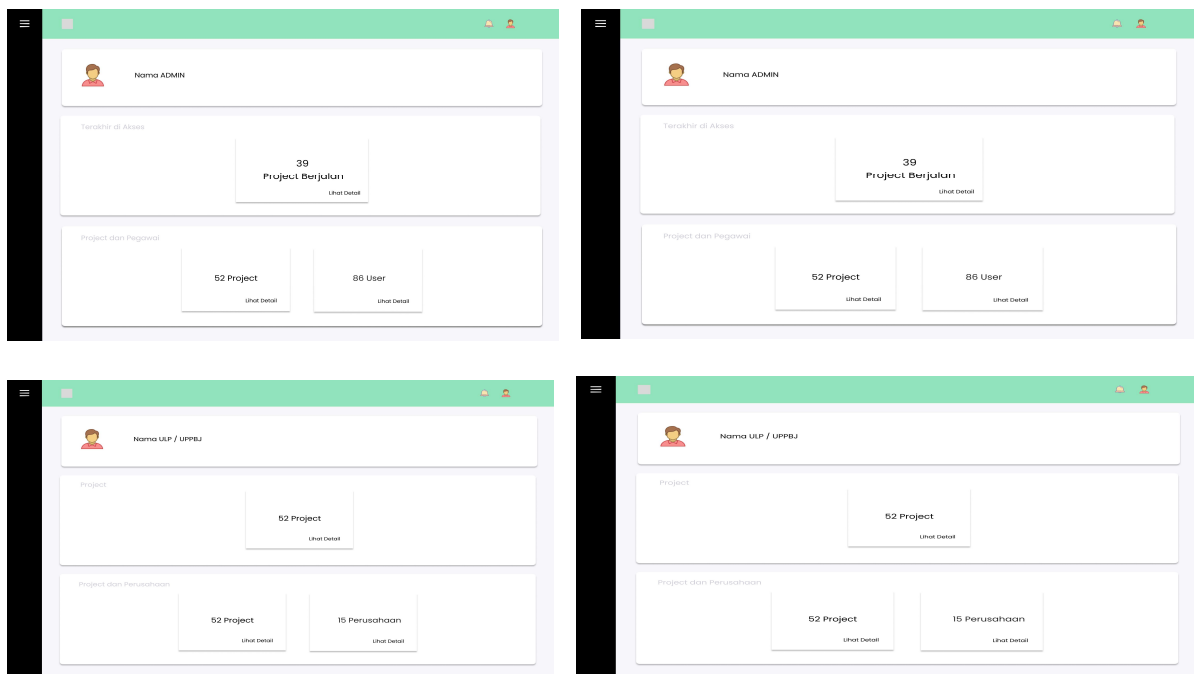
b. Pembuatan Aplikasi

Dalam proses pembuatan aplikasi ini dimulai dari ekstraksi fitur yang berasal dari data diskusi dan wawancara yang dilakukan Bersama mitra. Dimana setelah ekstraksi fitur dilakukan desain Lo-fi dan Hi-fi, implementasi coding dan input database. Berdasarkan role yang dibuat dibawah ini terdapat beberapa contoh gambaran desain Low-Fidelity dan High- Fidelity dari Aplikasi.

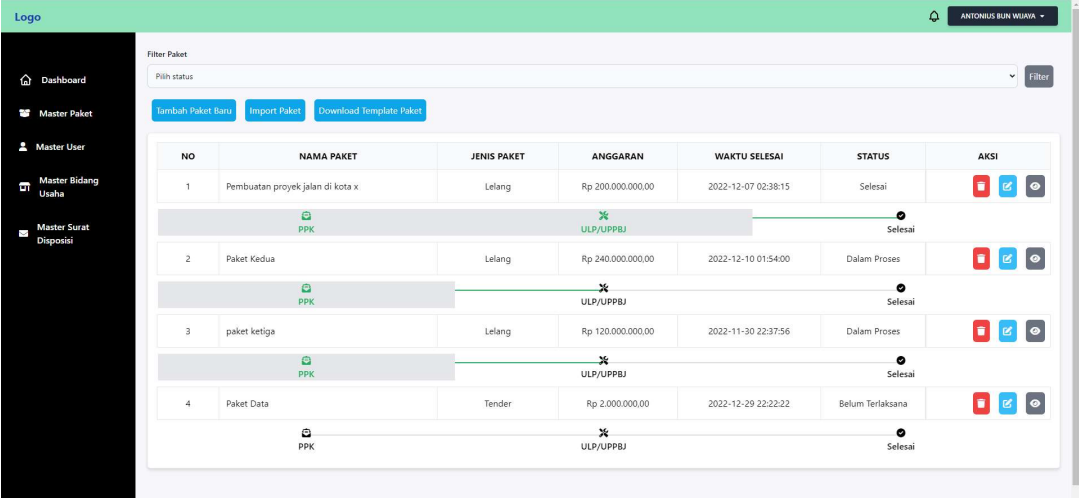




Gambar 4. Contoh Desain Low-fi Aplikasi APPA.



Gambar 5. Contoh Desain Hi-fi Aplikasi APPA.

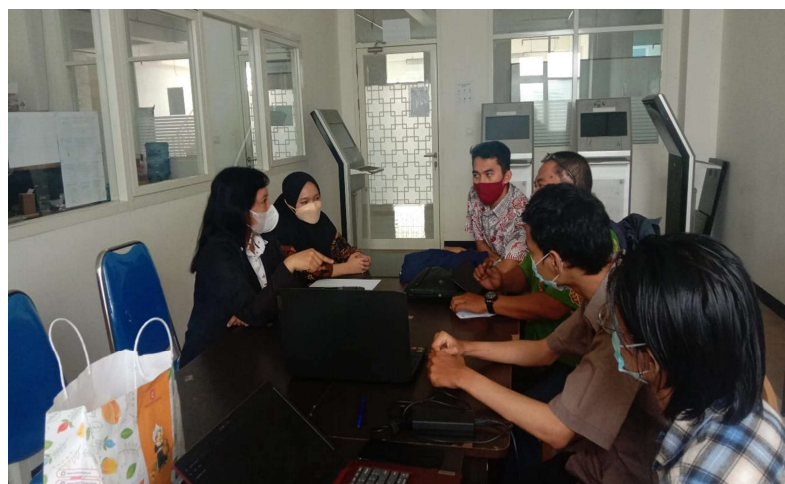


NO	NAMA PAKET	JENIS PAKET	ANGGARAN	WAKTU SELESAI	STATUS	AKSI
1	Pembuatan proyek jalan di kota x	Lelang	Rp 200.000.000,00	2022-12-07 02:38:15	Selesai	[Icon]
2	Paket Kedua	Lelang	Rp 240.000.000,00	2022-12-10 01:54:00	Dalam Proses	[Icon]
3	paket ketiga	Lelang	Rp 120.000.000,00	2022-11-30 22:37:56	Dalam Proses	[Icon]
4	Paket Data	Tender	Rp 2.000.000,00	2022-12-29 22:22:22	Belum Terlaksana	[Icon]

Gambar 6. Contoh Finish Aplikasi APPA.

c. Evaluasi

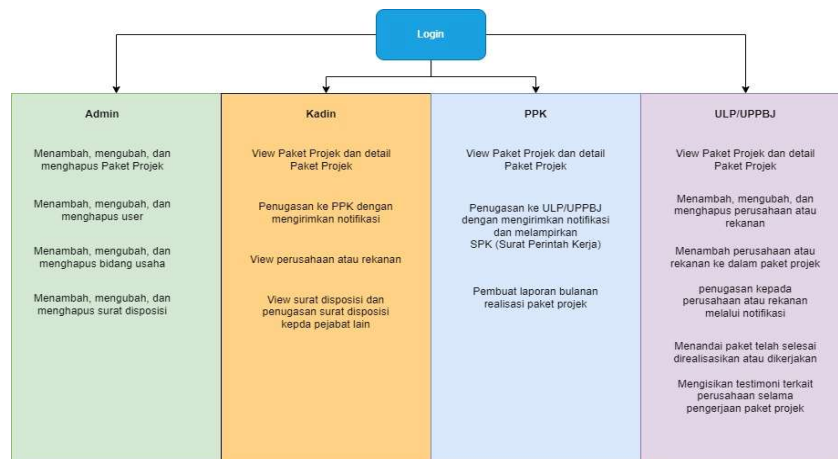
Pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan mitra untuk presentasi produk yaitu aplikasi APA dimana untuk beberapa perlu di evaluasi baik untuk desain dan juga terdapat tambahan fitur yang diinginkan oleh mitra dengan ini tim melakukan evaluasi desain, prototype dan juga system serta pada tahap ini dilakukan review terhadap hasil pekerjaan (deliverable product) selama satu sprint. Tidak hanya hasilnya, proses kerja tim juga dinilai sehingga ditentukan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk proses pengembangan sprint selanjutnya. Sprint dianggap berhasil apabila pada sprint tersebut menghasilkan delivery product yang sesuai dengan acceptance criteria yang telah ditentukan dan disetujui oleh mitra.



Gambar 7. Presentasi Produk dan Evaluasi Hasil

HASIL

Berdasarkan metode pelaksanaan yang telah dirancang, maka pada pengembangan prototype aplikasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan observasi yang telah dilaksanakan, maka prototype aplikasi berhasil dibangun dan masih terus dikembangkan.



Gambar 8. Gambaran Sistem Aplikasi APPA

Berikut adalah tampilan aplikasi:

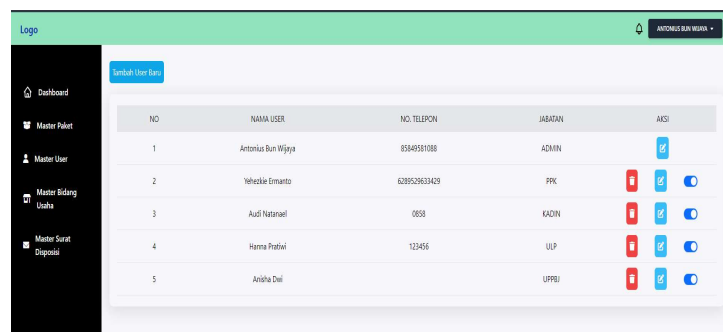
1. Role Administrator

Pada halaman master paket role admin seperti yang ditunjukkan pada gambar 9, admin mengambil peranan penting yang dimana dapat melakukan penambahan paket – paket proyek yang dapat dilakukan impor dari dokumen berformat excel sesuai dengan template yang telah tersedia. Selain itu paket yang kurang sesuai dapat dihapus atau diubah menggunakan tombol aksi yang telah tersedia pada tiap paketnya.

NO	NAMA PAKET	JENIS PAKET	ANGGARAN	WAKTU SELESAI	STATUS	AKSI
1	Pembuatan proyek jalan di kota x	Lelang	Rp 200.000.000,00	2022-12-07 02:38:15	Selesai	[Edit] [Hapus]
2	Paket Kedua	Lelang	Rp 240.000.000,00	2022-12-10 01:54:00	Dalam Proses	[Edit] [Hapus]
3	paket ketiga	Lelang	Rp 120.000.000,00	2022-11-30 22:37:56	Dalam Proses	[Edit] [Hapus]
4	Paket Data	Tender	Rp 2.000.000,00	2022-12-29 22:22:22	Belum Terlaksana	[Edit] [Hapus]

Gambar 9. Master Paket Role Admin

Pada halaman master user seperti pada gambar 10, admin dapat menambahkan user untuk login ke dalam aplikasi APPA ini, selain itu admin juga dapat mengubah dan menghapus akun user, serta dapat juga menonaktifkan akun user apabila akun tersebut sudah tidak digunakan.

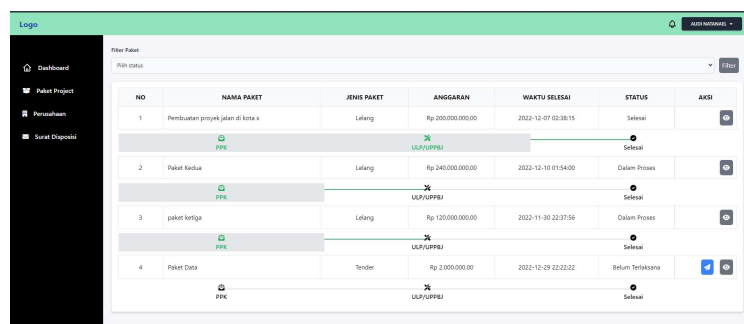


NO	NAMA USER	NO. TELEPON	JABATAN	AKSI
1	Antonius Bun Wijaya	85849581088	ADMIN	
2	Neheskie Esmanto	6209529634429	PPK	
3	Audi Netaisel	0858	KADIN	
4	Hanna Pratwi	123456	ULP	
5	Ariska Dini		UPPB	

Gambar 10. Master User Role Admin

2. Role Kadin (Kepala Dinas)

Pada halaman Role Kadin seperti pada gambar 11, setiap paket yang sudah dimasukkan oleh admin dapat ditugaskan kepada PPK secara otomatis dengan menekan tombol aksi berwarna biru, selain itu Kadin juga dapat melihat detail dari paket tersebut.



NO	NAMA PAKET	JENIS PAKET	ANGGARAN	WAKTU SELESAI	STATUS	AKSI
1	Pembuatan proyek jalan di kota x	Lelang	Rp 200.000.000,00	2022-12-07 02:38:15	Selamat	
2	Paket Gudang	Lelang	Rp 240.000.000,00	2022-12-10 01:54:00	Dalam Proses	
3	paket krtiga	Lelang	Rp 120.000.000,00	2022-11-30 22:37:56	Dalam Proses	
4	Paket Data	Tender	Rp 2.000.000,00	2022-12-29 22:22:02	Belum Terlaksana	

Gambar 11. Penugasan paket ke PPK role Kadin

3. Role PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Pada halaman notifikasi seperti pada gambar 12, PPK dapat melihat paket yang telah ditugaskan dari Kadin untuk dikerjakan, dan kemudian dari PPK akan mengirimkan penugasan paket tersebut kepada pejabat ULP/UPPB untuk realisasi paket proyek tersebut yang dimana PPK

akan mengirimkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pejabat ULP/UPPBJ.



NO	NAMA PAKET	JENIS PAKET	ANGGARAN	WAKTU SELESAI	STATUS	AKSI
1	Pembuatan proyek jalan di kota x	Lelang	Rp 200.000.000,00	2022-12-07 02:38:15	Selesai	
2	paket ketiga	Lelang	Rp 120.000.000,00	2022-11-30 22:37:56	Dalam Proses	
3	Paket Kedua	Lelang	Rp 340.000.000,00	2022-12-10 01:54:00	Dalam Proses	

Gambar 12. Notifikasi Role PPK

4. Role ULP (Unit Layanan Pengadaan) /UPPBJ (Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa)

Pada halaman master perusahaan seperti pada gambar 13 untuk role ULP/UPPBJ, pejabat tersebut dapat memasukkan perusahaan atau rekanan baru yang dapat bergabung serta bekerja sama dengan pihak dinas.



NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	NO. TELEPON	AKSI
1	PT XYZ	Pendidikan	+1 (800) 498-4451	
2	PT Suka Suka	Pendidikan	12345	

Gambar 13. Master Perusahaan role ULP/UPPBJ

Pada halaman notifikasi role ULP/UPPBJ seperti pada gambar 13, ULP/UPPBJ dapat memasukkan perusahaan-perusahaan yang akan merealisasikan paket tersebut seperti pada gambar 12, mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan atau rekanan terkait dengan penugasan paket tersebut.

DISKUSI

Jember merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Tentunya dengan banyaknya jumlah kecamatan dan kabupaten dalam beberapa hal mengenai kepentingan pemerintahan masih cukup kurang dalam penanganannya, khususnya yang dikeluhkan oleh salah satu dinas pemerintahan di Kabupaten Jember yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya mengenai penyerapan anggaran daerah yang masih memerlukan perhatian khusus agar semua anggaran daerah bisa terserap dengan baik

khususnya di Dinas – Dinas terkait di kabupaten Jember yang serapan anggarannya kurang baik dan optimal selain daripada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya⁶.

Serapan anggaran adalah persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah/SKPD berupa laporan keuangan yang disebut realisasi anggaran. Serapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola target-target pembangunan yang dalam angka-angka keuangan dalam laporan keuangan, yang merupakan akuntabilitas media. Keuangan publik harus dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan publik, merencanakan dengan baik rencana pembayaran selama satu bulan tahun anggaran. Perbedaan antara anggaran dan realisasinya menggambarkan varian anggaran, yang secara pertunjukan menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi secara implisit menunjukkan bahwa sisa anggaran (varian anggaran) yang rendah pada akhir tahun, yang memiliki kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakuratan dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran. Terdapat 73,50% serapan anggaran yang dibutuhkan oleh empat faktor, yakni perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan satuan kerja internal, yang didukung hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh serta mencerminkan beban kerja SKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait⁷.

Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp134,26 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan I 2022 hanya sebesar 9,28% terhadap pagu anggaran. Wakil Gubernur Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jawa Timur, untuk mempercepat realisasi APBD 2022. Untuk target penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada triwulan (TW) I ialah sebesar 23,58%, TW II sebesar 57,34%, TW III sebesar 84,12% sehingga pada TW IV mencapai 100%⁸. Selain itu di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur khususnya di kabupaten Jember, menurut Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni usai rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DPRD Jember, Jawa Timur, hampir semua OPD mitra kerja Komisi A serapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Rendahnya serapan APBD di beberapa OPD juga diakui oleh Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono yang menyampaikan mitra kerja OPD di komisinya juga masih berjalan stagnan. "Serapan anggaran beberapa OPD masih berkisar 38 hingga 40 persen karena alasan sistem dan mutasi, sehingga pejabat atau pegawai yang dipindah harus menyesuaikan lagi". Berdasarkan hal ini beliau berharap masing-masing OPD bekerja dalam menyerap anggaran terutama untuk kegiatan yang langsung dengan masyarakat. Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto optimistis serapan APBD bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun 2021, sehingga semua program OPD bekerja. "Semua OPD sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di atas 90 persen"⁹.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Jember, maka ditemukan permasalahan umum yang

⁶ "Parasetamol - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas."

⁷ Ruhmaini, Abdullah, and Darwanis, "Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah."

⁸ Dinas Kominfo, "Wagub Emil Instruksikan TW II 2022 APBD Jatim Terserap 50%."

⁹ "Serapan APBD Jember Tahun Anggaran 2021 Masih Rendah - ANTARA News Jawa Timur."

terjadi pada Dinas terkait sebagai berikut: (1) Berjalanya penyerapan anggaran Tidak optimal karena tidak adanya notifikasi pengingat tugas dari beberapa divisi yang ini menyebabkan jadwal yang sudah ditentukan menjadi mundur dan tidak sesuai sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak terserap dengan baik; (2) Kurang efektifnya dalam hal surat menyurat dimana segala surat yang masuk harus di cek oleh pimpinan secara manual, sedangkan pimpinan tidak selalu berada di kantor, hal ini menyebabkan terjadinya double pembuatan surat tugas dari pimpinan ke anggota dikarenakan prnumpukan surat yang masuk dan masih harus di cek secara manual.

Dalam proses pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika melakukan pengabdian masyarakat ini, yaitu (a) Pengumpulan Data, (b) Pembuatan Aplikasi, (c) Evaluasi, (d) dan Sosialisasi (Gambar 1). *Pengumpulan Data* - Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari diskusi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Jember. Menggunakan metode wawancara untuk user requirement Data sekunder yang dikumpulkan adalah studi literatur terkait peraturan daerah tentang serapan anggaran, teori SDLC, desain UI/UX data pendukung penelitian lainnya. *Pembuatan Aplikasi* - Dalam proses pembuatan aplikasi ini dimulai dari ekstraksi fitur yang berasal dari data diskusi dan wawancara yang dilakukan Bersama mitra. Dimana setelah ekstraksi fitur dilakukan desain wireframe atau gambaran kasar aplikasi yang berasal dari ekstraksi fitur. Kedua menuangkan dalam desain Lo-fi dan Hi-fi, implementasi coding dan input database. *Evaluasi* - Pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan mitra untuk presentasi produk yaitu aplikasi APPA dimana untuk beberapa perlu di evaluasi baik untuk desain dan juga terdapat tambahan fitur yang diinginkan oleh mitra dengan ini tim melakukan evaluasi desain, prototype dan juga system serta pada tahap ini dilakukan review terhadap hasil pekerjaan (deliverable product) selama satu sprint. Tidak hanya hasilnya, proses kerja tim juga dinilai sehingga ditentukan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk proses pengembangan sprint selanjutnya. Sprint dianggap berhasil apabila pada sprint tersebut menghasilkan delivery product yang sesuai dengan acceptance criteria yang telah ditentukan dan disetujui oleh mitra.

Berdasarkan metode pelaksanaan yang telah dirancang, maka pada pengembangan prototype aplikasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan observasi yang telah dilaksanakan, maka prototype aplikasi berhasil dibangun dan masih terus dikembangkan. *Halaman Admin* - admin mengambil peranan penting yang dimana dapat melakukan penambahan paket – paket proyek yang dapat dilakukan impor dari dokumen berformat excel sesuai dengan template yang telah tersedia. Selain itu paket yang kurang sesuai dapat dihapus atau diubah menggunakan tombol aksi yang telah tersedia pada tiap paketnya (Gambar 9). *Halaman KADIN* - Halaman Kadin dimana Kadin dapat melihat setiap paket yang sudah dimasukkan oleh admin dapat ditugaskan kepada PPK secara otomatis dengan menekan tombol aksi berwarna biru, selain itu Kadin juga dapat melihat detail dari paket tersebut (Gambar 11). *Halaman PPK* – Halaman PPK digunakan untuk dapat melihat paket yang telah ditugaskan dari Kadin untuk dikerjakan, dan kemudian dari PPK akan mengirimkan penugasan paket tersebut kepada pejabat ULP/UPPBJ untuk realisasi paket proyek tersebut yang dimana PPK akan mengirimkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada pejabat ULP/UPPBJ (Gambar 12). *Halaman ULP/UPPBJ* - Halaman ULP/UPPBJ dapat memasukkan perusahaan-perusahaan yang akan merealisasikan paket tersebut serta mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan atau rekanan terkait dengan penugasan paket tersebut (Gambar 13).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sampai saat ini, dapat disimpulkan bahwa prototype aplikasi yang telah dibangun mampu membantu dan mendukung kemudahan dalam penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Jember. Kemampuan aplikasi ini tidak lepas dari proses requirement gathering yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mitra di lapangan. Serta dalam penyajian data menyesuaikan dengan data kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga informasi yang dihasilkan oleh aplikasi memiliki keakuratan data yang cukup tinggi dengan kenyataan di lapangan. Selain itu pembuatan aplikasi notifikasi untuk membantu memperlancar proses kerja sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan dimana sangat memudahkan proses kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya apabila dibandingkan dengan tidak adanya aplikasi notifikasi yang kami buat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun material sehingga jurnal pengabdian masyarakat ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada: 1. Yulia Wahyuningsih, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa KKN. 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya selaku Mitra KKN Kabupaten Jember yang telah memberi kesempatan tim untuk melaksanakan kegiatan KKN di tempat mitra. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

DAFTAR REFERENSI

Dinas Kominfo. “Wagub Emil Instruksikan TW II 2022 APBD Jatim Terserap 50%.” *Jatim Newsroom*, 2022. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/wagub-emil-instruksikan-tw-ii-2022-apbd-jatim-terserap-50->.

Ruhmaini, Ruhmaini, Syukriy Abdullah, and Darwanis Darwanis. “Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2019): 31–43.

Susanti, Erma, Erfanti Fatkhiyah, and Endang Efendi. “Pengembangan Ui/Ux Pada Aplikasi M-Voting Menggunakan Metode Design Thinking.” *Simposium Nasional RAPI XVIII* (2019): 364–370.

“Parasetamol - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Parasetamol>.

“Serapan APBD Jember Tahun Anggaran 2021 Masih Rendah - ANTARA News Jawa Timur,” n.d.